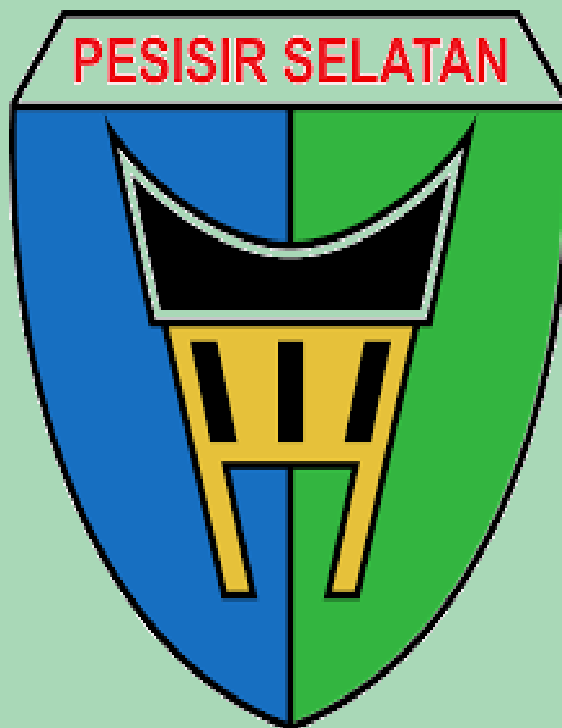


RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

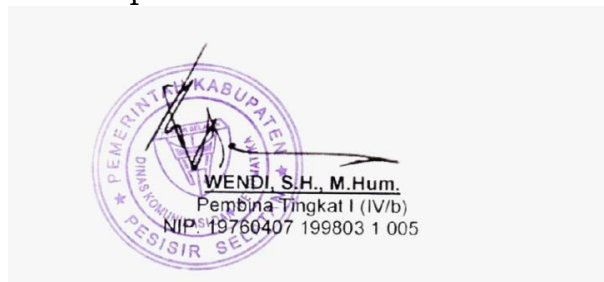
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan yang menyesuaikan dengan dinamika kebijakan pembangunan daerah, kondisi aktual, serta kebutuhan masyarakat akan layanan komunikasi dan informatika yang semakin berkembang.

Renja Perubahan ini disusun sebagai tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, perubahan arah kebijakan pemerintah daerah, serta hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan konsultasi publik. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memastikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2025–2030, kebijakan nasional, serta prioritas pembangunan berbasis transformasi digital.

Semoga Renja Perubahan Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat menjadi acuan yang efektif dalam mewujudkan pelayanan komunikasi publik yang transparan, pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perubahan Tahun 2025 diperlukan sebagai respons atas regulasi baru yang ditetapkan melalui Inmendagri No. 2 Tahun 2025, yang mengamanatkan penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra Perangkat Daerah periode 2025–2029 dengan struktur dan pendekatan yang diperbaharui. Kebijakan ini mengharuskan perangkat daerah menyesuaikan program dan kegiatan agar selaras dengan visi-misi kepala daerah terpilih dan mendukung target pembangunan daerah yang baru.

Selain itu, Renja Perubahan 2025 juga berangkat dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja sebelumnya, serta kebutuhan untuk menindaklanjuti isu-isu strategis yang muncul selama pelaksanaan sehingga terdapat kebutuhan untuk mengubah prioritas, penganggaran, dan pelaksanaan program agar lebih efektif dan efisien yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode triwulan III (tiga).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini adalah pedoman bagi Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam lanjutan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025 dan Renja Perubahan Tahun 2025 untuk menyesuaikan program, kegiatan, dan target kinerja Dinas Kominfo dengan dinamika perkembangan kebijakan nasional maupun daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2025, serta kebutuhan pelayanan masyarakat yang mendesak. Perubahan ini bertujuan agar pelaksanaan program tetap relevan, efisien, serta sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan ketersediaan sumber daya.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan tetap selaras dengan dinamika kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perubahan regulasi, serta hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan. Melalui perubahan ini, diharapkan arah pelaksanaan program Dinas Kominfo dapat lebih adaptif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan:

1. Menjadikannya sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam berbagai forum yang sesuai dengan konstitusi;
2. Merumuskan gambaran umum langkah operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melalui program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika;

3. Menjadikannya sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2025;
4. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; dan
5. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.
6. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan evaluasi terhadap program, kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan triwulan II.

1.4 Sistematika Penulisan

Kata Pengantar

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kerja pada tahun 2025 sampai dengan Kondisi Triwulan II tahun anggaran 2025 antara lain :

2.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
yang meliputi :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan
- f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar 52 %.

2.1.2. Program Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
- b. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

Program Aplikasi Informatika sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar 33%.

2.1.3. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
- c. Sub Kegiatan Relasi Media
- d. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

Program Informasi dan Komunikasi Publik Capaian Kinerja dan Keuangan sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar 28%.

2.1.4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Capaian Kinerja dan Keuangan sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar 14 %.

2.1.5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Capaian Kinerja dan Keuangan sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar 18%.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian triwulan II tahun 2025. Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan sebanyak 5 program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 8.065.325.050,- (Delapan milyar enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima puluh rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan pada triwulan II dengan realisasi anggaran Rp. 3.539.929.776,- (Tiga milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 44 %.

1. Program/Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - h. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- j. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pelaksanaan pada sub kegiatan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika, pencapaian kinerjanya sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam target pada masing-masing sub kegiatan.

Pada Bidang Aplikasi Informatika ada 4 sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan/atau rewiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
- b. Sub Kegiatan Pengembangan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE.

Pelaksanaan sub kegiatan pada Bidang Aplikasi Informatika , capaian kinerja yang dicapai yaitu :

- Terpenuhinya layanan Akses Internet/Intranet untuk 45 Perangkat Daerah (Badan/Dinas/Kecamatan/RSUD), 20 Puskesmas dan 1 RSUD Tapan dengan biaya Langganan Internet Dedicated layanan Akses Internet selama 1 (satu) tahun dengan 1 (satu) Penyedia Layanan;
Periode Layanan: Januari s.d Desember 2025 (12 Bulan)
- Internet Dedicated Fiber Optik IP Transit (Domestik) :500 Mbps.
- Internet Dedicated Fiber Optik IP Transit (Internasional) : 350 Mbps
- Internet Dedicated LPSE : 50 Mbps
- Internet High Speed Broadband Kantor LPSE : 300 Mbps.
- Internet Highspeed Broadband (20 Puskesmas, 1 RSUD Tapan dan 1 Kantor Perwakilan) = 22 lokasi x 100 Mbps.

- Internet Highspeed Broadband (14 Kantor Kecamatan) = 14 lokasi x 50 Mbps.
- Internet Free Wifi (25 lokasi) : 25 lokasi x 20 Mbps
- Jasa Perbaikan Fiber Optik Mandiri Pemkab Pesisir Selatan.
- Tersedianya aplikasi yang dibutuhkan oleh perangkat daerah, baik aplikasi yang dibuat maupun yang dikembangkan terdiri dari 3 aplikasi baru dan 11 pengembangan aplikasi.

Bidang Informasi Komunikasi Publik memiliki 3 sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Relasi Media
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pelaksanaan Sub Kegiatan pada Bidang Informasi Komunikasi Publik, capaian kinerja yang dicapai yaitu :

- Terlaksananya penyampaian berita pembangunan daerah melalui media online sebanyak
- PPID Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan triwulan II telah melakukan verifikasi Data Informasi Publik (DIP) sebanyak 1021 DIP
- Terselenggaranya penyampaian hasil pembangunan daerah Pesisir Selatan melalui Radio Langkisau FM maupun mobil keliling penerangan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Terlaksananya kegiatan evaluasi Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat untuk 15 Kecamatan.

Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari :

- Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

- Terlaksananya Bimbingan teknis Pengajuan Rekomendasi dan Meta data statistik dengan jumlah peserta 10 Perangkat Daerah.
- Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan jumlah peserta 52 Orang (Produsen Data).

Pelaksanaan Sub Kegiatan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik pada Kegiatan Bidang Statistik dan Persandian, capaian kinerjanya yaitu :

- Pembuatan Tanda Tangan Digital yang ditargetkan sebanyak 100 ASN dan Non ASN yang berada di Pemerintah Daerah dan yang telah teralisasi pada triwulan II sebanyak 75 ASN dan Non ASN.

Program/Kegiatan/sub kegiatan yang belum mencapai target kinerja hasil/keluaran yaitu :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat.

Kondisi ini disebabkan adanya perubahan jadwal program dari pemerintah pusat yang menjadi rujukan teknis pelaksanaan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat di Kecamatan.

Program/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan IV.

Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan triwulan II dapat dikatakan baik, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Baik yaitu dengan nilai 50 %.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2025 hingga pertengahan 2025 menunjukkan kinerja pelayanan yang cukup baik dan terus berkembang, terutama dalam penyediaan layanan informasi publik, pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta dukungan transformasi digital pemerintahan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja perangkat daerah, yang disesuaikan menurut perangkat dengan format daerah masing-masing,tableT-C.30

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan
Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2023	2024	2025	
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja			A(81)	A(81)	A(82)	A(84)	A(86)	A(83.94)	A(85.49)	A(83.94)	A(85.49)	A(88,24)	
2	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi			3,35	3,40	3,55	4,20	4.23	3,48	4,17	3,55	4,23	4,23	
3	Meningkatnya Digutalisasi Pemerintahan			4,19	4,20	4,21	4,76	5,00	-	4,76	4,21	4,76	5,00	
4	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik			Infor matif (93)	Infor matif (93)	Infor atif (99,92)	Infor atif (99,92)	Informa tif (99,92)	Informa tif (99,92)	Informa tif (97,20)	Informa tif (99,92)	Memua skan	Informa tif (99,92)	
5	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah			100	100	100	100	97	-	97	100	100	97	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2025, terdapat beberapa isu penting yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran

Penyesuaian alokasi anggaran akibat dinamika kebijakan fiskal daerah menyebabkan sebagian program prioritas perlu ditata ulang, termasuk kegiatan yang mendukung transformasi digital dan layanan komunikasi publik.

2. Perkembangan Teknologi Informasi yang Cepat

Perubahan teknologi yang begitu pesat menuntut peningkatan kapasitas aparatur, pembaruan infrastruktur TIK, serta penyusunan regulasi pendukung yang adaptif.

3. Kebutuhan Peningkatan Literasi Digital Masyarakat

Tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata menjadi tantangan dalam mendorong pemanfaatan layanan publik berbasis elektronik dan keterbukaan informasi.

4. Koordinasi Lintas Perangkat Daerah

Pelaksanaan kebijakan Satu Data dan SPBE (Pemerintahan Digital) memerlukan sinergi lintas sektor yang masih perlu diperkuat agar integrasi data dan layanan digital berjalan optimal.

Isu-isu tersebut menjadi perhatian utama dalam Renja Perubahan 2025 agar setiap program dan kegiatan Diskominfo dapat tetap selaras dengan visi misi RPJMD, mendukung pelayanan informasi publik yang efektif, serta mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Pesisir Selatan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan keselarasan program Dinas Komunikasi dan Informatika dengan arah kebijakan pembangunan daerah, capaian RPJMD 2021–2026, serta perkembangan kebutuhan masyarakat. Hasil review menunjukkan

bahwa sebagian target awal perlu disesuaikan akibat perubahan kondisi, antara lain adanya Hasil review menegaskan perlunya sinkronisasi antara sasaran tahunan RKPD dengan sasaran strategis Renstra, khususnya pada peningkatan layanan komunikasi publik, penguatan infrastruktur TIK, serta akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data dan dinamika kebijakan nasional di bidang transformasi digital.

Beberapa program yang direvisi meliputi penyesuaian target penundaan kegiatan kemitraan komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) karena belum optimalnya kesiapan kelembagaan. Sementara itu, program penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tetap menjadi prioritas dengan penekanan pada peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah.

Secara keseluruhan, hasil review ini menjadi dasar penyusunan Renja Perubahan 2025 agar setiap kegiatan Diskominfo tetap relevan, terukur, dan mampu mendukung peningkatan layanan komunikasi publik, keterbukaan informasi, serta akselerasi transformasi digital di Kabupaten Pesisir Selatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan sebagai bagian dari proses perencanaan partisipatif melalui Musrenbang nagarai,kecamatan, kabupaten, forum perangkat daerah, serta kanal aspirasi masyarakat. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa usulan yang disampaikan selaras dengan visi-misi RPJMD 2025–2030 dan arah strategis Renstra Diskominfo, khususnya dalam peningkatan layanan komunikasi publik, literasi digital, dan penguatan infrastruktur TIK. Koordinasi lintas sektor lebih ditingkatkan agar program dan kegiatan dapat bersinergis sehingga mencapai sasaran yang terarah dan tepat.

Tabel 2. 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Untuk mewujudkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika yang berkelanjutan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mengacu Telaahan terhadap kebijakan nasional menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, dengan mengintegrasikan arah pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2030 dan Renstra Diskominfo 2025–2030. Kebijakan nasional yang relevan meliputi Transformasi Digital Nasional, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintahan Digital (Pemdi), Satu Data Indonesia, serta Strategi Nasional Literasi Digital. Dalam pelaksanaan tersebut perlu adanya :

1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur dengan tujuan pemerataan konektivitas telekomunikasi;
2. Pengelolaan data dan keamanan informasi yang andal, sesuai standar nasional Satu Data Indonesia;
3. Peningkatan literasi dan kapasitas digital bagi aparatur dan masyarakat;
4. Optimalisasi komunikasi publik yang transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Dengan dasar kebijakan nasional tersebut, Renja Perubahan tahun 2025 diarahkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan Diskominfo agar tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga mendukung pengelolaan komunikasi dan informatika yang berkelanjutan, selaras dengan visi RPJMD 2025–2030 dan Renstra Dinas Kominfo 2025–2030, serta memperkuat transformasi digital di Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan :

1. Mewujudkan layanan komunikasi dan informatika yang efektif, terbuka, dan inklusif sebagai penunjang pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Memperkuat infrastruktur TIK serta ekosistem digital daerah guna mendorong percepatan pemerintahan berbasis elektronik.
3. Meningkatkan literasi digital dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan.
4. Mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi melalui kebijakan Satu Data Indonesia yang aman dan terpadu.

3.2.2. Sasaran

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini disusun dengan sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan komunikasi publik yang cepat dan terpercaya.
2. Ketersediaan infrastruktur TIK yang merata dan handal.
3. Pelaksanaan Pemerintahan Digital.
4. Terwujudnya masyarakat yang cakap digital melalui edukasi literasi dan keamanan siber.
5. Penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi yang terpadu, aman, dan sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama

dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program dan kegiatan yang dirancang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan untuk dioperasionalisasikan pada tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika. Program-program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024 mendukung prioritas pembangunan . Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025**

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)			
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF Rp.)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KBUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Diskominfo	12 Dokumen	57.902.750	APBD
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase terlaksananya Keuangan Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Diskominfo	33 orang	4.120.941.6 73	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Diskominfo	12 Dokumen	101.871.316	APBD
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM	Persentase terlaksananya				

PERANGKAT DAERAH	adminsitrasi umum perangkat daerah				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Diskominfo	7 paket	5.185.475	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Diskominfo	1 Paket	9.426.930	APBD
Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Diskominfo	1 paket	10.073.037	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Diskominfo	12 Dokumen	5.400.000	APBD
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	Diskominfo	12 Laporan	6.600.000	APBD
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Diskominfo	12 Laporan	68.305.000	APBD
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Diskominfo	0	0	APBD
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Diskominfo	12 Laporan	216.360.000	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Diskominfo	12 Laporan	160.800.000	APBD
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dipelihara				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	Diskominfo	1 Unit	40.998.000	APBD

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Diskominfo	2 unit Mobil dan 10 unit Motor	80.642.300	APBD
Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Diskominfo	1 unit	14.150.000	APBD
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Diskominfo	1 unit	0	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi public pemerintah daerah				
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi public pemerintah daerah				
Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	Diskominfo	12 Laporan	286.063.500	APBD
Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	Diskominfo	15 Komunitas	13.740.000	APBD
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Pemohon)	Diskominfo	20 Pemohon	163.550.912	APBD
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola	Diskominfo	3 Media	184.587.500	APBD

	maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)				
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMASI	Indeks SPBE	Kab.Pesisir Selatan			
KEGIATAN PENGELOLAAN E GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengelolaan E Government di lingkup Kab.Pesisir Selatan	Kab.Pesisir Selatan			
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah daerah.	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	Diskominfo	2 dokumen	59.244.684	APBD
KhususSub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	Diskominfo	5 Aplikasi	231.410.000	APBD
Sub Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	Diskominfo	41 Perangkat Daerah	396.752.350	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka pengekenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	Kab.Pesisir Selatan	41 Perangkat Daerah	1.706.640.000	APBD
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	Kab.Pesisir Selatan			
KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penyediaan data statistik sektoral daerah Kab. Pesisir Selatan	Kab.Pesisir Selatan			
Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat	Kab.Pesisir Selatan	100	32.294.110	APBD

	diakses oleh pengguna data. (%)				
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	Kab.Pesisir Selatan	100	50.829.040	APBD
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	Kab.Pesisir Selatan			
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	Kab.Pesisir Selatan			
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	Kab.Pesisir Selatan	3 Laporan	41.556.278	APBD
Jumlah				8.065.325.000	

BAB V

PENUTUP

Hasil evaluasi atas Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 triwulan II menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 50 % atau dapat dikategorikan baik.

Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Diskominfo Tahun 2025 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Diskominfo yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika , guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.

Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan atas berbagai pertimbangan dan perubahan lingkungan strategis dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan nasional.

Semoga Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.



